

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh kota besar, tidak terkecuali Kota Bandung. Sebagai ibukota provinsi Jawa Barat, Kota Bandung menduduki peringkat kedua sebagai kota termacet di Indonesia setelah kota Jakarta (Studi Kementerian Perhubungan tahun 2011). Hal ini dikarenakan kondisi jumlah pengguna kendaraan di Kota Bandung selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Berikut jumlah pengguna kendaraan di Kota Bandung dari tahun 2008-2010 menurut data dari Dinas Perhubungan Kota Bandung (2011).

Tabel I. 1 Jumlah Kendaraan di Kota Bandung Tahun 2008-2010

No.	Jenis Kendaraan	Tahun		
		2008	2009	2010
1	Kendaraan roda 2	703.827	784.726	859.411
2	Kendaraan roda 4	335.711	352.107	356.174
	Jumlah	1.039.538	1.136.833	1.215.585
	Jumlah	1.039.538	1.136.833	1.215.585

Dari Tabel I.1, menunjukkan jumlah kendaraan di Kota Bandung terus mengalami peningkatan yang cukup besar. Total peningkatan yang terjadi hampir mencapai 10% tiap tahunnya, dan jumlah ini hanya berasal dari pengguna kendaraan dari Kota Bandung. Jumlah kendaraan tersebut akan bertambah sekitar 250 ribu mobil di setiap libur panjang akhir pekan (*long weekend*), yang berasal dari kota-kota di sekitar Kota Bandung.

Jumlah peningkatan kendaraan di Kota Bandung juga dibuktikan dengan telah diberlakukannya penggunaan tiga seri huruf di belakang pelat nomor bagi kendaraan roda dua pada akhir bulan Februari 2011. Menurut Direktur Lalu Lintas Polda Jabar, penggunaan seri nomor polisi (nopol) tiga huruf bagi kendaraan roda dua tersebut dikarenakan alokasi yang tersedia sudah tidak mencukupi lagi. Penggunaan nopol tersebut mulai diberlakukan untuk wilayah Kota Bandung,

Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi, khususnya untuk kendaraan roda dua keluaran tahun 2011.

Menurut data dari Dinas Marga tahun 2011, total panjang jalan di Kota Bandung adalah 1.236,28 km yang terbagi berdasarkan tingkat pembinaannya menjadi Jalan Nasional (33,36 km; 7 ruas), Jalan Propinsi (17,54 km; 9 ruas), dan Jalan Kota (1.185,38 km). Penambahan total jalan tersebut hanya sekitar 7% sejak tahun 2003 (dengan total panjang jalan 932,701 km). Total luas jalan saat ini hanya sebesar 4,9% dari wilayah Kota Bandung. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2010 tentang standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, jumlah tersebut masih kurang dari standar kebutuhan minimal sekitar 15% dari luas wilayah Kota Bandung.

Ketersediaan sarana jalan raya secara nyata menunjukkan jumlah yang tidak sebanding dengan tingkat kepadatan pengguna kendaraan dan ditambah lagi bahwa sebagian badan jalan tersebut digunakan untuk kebutuhan parkir kendaraan (*on street parking*), sehingga masalah transportasi di Kota Bandung menjadi sangat kompleks. Apabila hal ini terus terjadi, transportasi Kota Bandung diprediksi mengalami lumpuh total di tahun 2031.

Melihat dari masalah tersebut, selain perlu diadakannya perencanaan penambahan total jalan di Kota Bandung, penyediaan tempat parkir mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem transportasi secara keseluruhan. Bertambahnya jumlah pengguna kendaraan akan menimbulkan meningkatnya permintaan jalan untuk menampung kegiatan lalu lintas. Penyediaan tempat-tempat parkir di badan jalan pada lokasi jalan tertentu mengakibatkan turunnya kapasitas jalan, terhambatnya arus lalu lintas dan penggunaan jalan menjadi tidak efektif. Sebagai salah satu faktor terbesar penyebab kemacetan yang sering terjadi di Kota Bandung, kondisi kebutuhan parkir di Kota Bandung semakin hari semakin melebihi dari kapasitas area parkir yang tersedia. Dalam pengertian lain, tidak adanya tempat parkir pada suatu kawasan tertentu menyebabkan kawasan tersebut tidak dapat memenuhi fungsi secara maksimal. Penggunaan trotoar dan badan jalan menjadi alternatif yang mengganggu kelancaran lalu lintas sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas pada kondisi-kondisi tertentu.

Hal yang sering terjadi di lapangan adalah area parkir yang disediakan tidak mampu menampung jumlah kendaraan yang ada (*demand > supply*). Banyak bangunan-bangunan (seperti tempat penginapan, rumah sakit, perguruan tinggi, dll) belum memiliki area parkir yang memadai yang mampu menampung seluruh kendaraan tersebut bahkan tidak memiliki area parkir sama sekali, sehingga sebagian kendaraan menggunakan trotoar atau badan jalan sebagai area parkir. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 12 Tahun 2001 mengenai tata tertib pengelolaan perparkiran, bahwa setiap bangunan umum harus dilengkapi dengan tempat parkir dan atau peralatan parkir, berdasarkan perhitungan kebutuhan tempat parkir untuk bangunan umum yang ditetapkan oleh Walikota.

Akibat lain, dengan adanya *on street parking* tersebut sering menimbulkan pungutan liar (pungli) yang seharusnya hal tersebut dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir (UPTD) Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi dinas daerah Kota Bandung. Pungli tersebut mengambil bagian sebesar hampir 15% tiap tahunnya dari total target pendapatan pajak parkir Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Target dan realisasi PAD Kota Bandung dari retribusi perparkiran dapat dilihat di Tabel I.2 berikut,

Tabel I. 2 Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Bandung

Tahun	Target	Realisasi
2008	Rp 6.000.000.000,00	Rp 4.571.239.500,00
2009	Rp 4.500.000.000,00	Rp 4.503.206.000,00
2010	Rp 4.800.000.000,00	Rp 4.553.160.000,00
2011	Rp 5.800.000.000,00	Rp 4.827.487.000,00
2012	Rp 6.800.000.000,00	Rp 4.903.047.000,00

Sejak dijalankannya konsep otonomi daerah yang dilandasi oleh Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah telah mengubah pola kebijakan pemerintah menjadi desentralistik, yaitu segala sesuatu

yang berhubungan dengan daerah menjadi terpusat di daerah dengan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pengelolaan area parkir tersebut seharusnya mampu meningkatkan anggaran PAD Kota Bandung apabila dikelola dengan baik. Besarnya potensi penerimaan pendapatan dari sektor perparkiran tersebut seharusnya mampu menjadi nilai tambah bagi Pemerintah kota untuk memberikan perhatian lebih terhadap sektor itu, sehingga selain dapat memberikan pemasukan yang besar juga dapat mengurangi besarnya jumlah pungutan liar. Berdasarkan data Keputusan Walikota Bandung Nomor 163 Tahun 2012, terdapat 221 titik parkir tepi jalan umum resmi yang dikelola oleh sebanyak 1774 juru parkir resmi. Namun, masih banyak terjadi titik parkir tepi jalan umum yang sangat potensial namun dikelola oleh pihak luar sehingga menimbulkan pungutan liar, dan kemacetan. Titik parkir liar ini, jika dikelola dengan baik oleh pemerintah dapat menyumbangkan retribusi daerah dan menambah pendapatan asli daerah Kota Bandung. Hal ini tentu saja akan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah No. 16 Tahun 2012 tentang retribusi di bidang perhubungan, yang merupakan pengelompokan kewenangan daerah di bidang pendapatan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung demi terwujudnya visi Kota Bandung sebagai kota jasa yang BERMARTABAT (Bersih, Makmur, Taat, dan Bersahabat).

Melihat dari permasalahan yang ada, dibutuhkan sistem yang mampu mengolah informasi menjadi suatu *knowledge* bagi penyedia area parkir, agar mampu memberdayakan seluruh potensi yang ada dalam mengelola area parkir yang menjadi tanggung jawabnya dan *knowledge* bagi pemerintah Kota Bandung mengenai kebijakan retribusi parkir yang seharusnya menjadi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung. *Knowledge* yang akan didapatkan para penyedia area parkir berasal dari data *history* luas area parkir, jumlah pengguna area parkir, jumlah parkir liar di trotoar atau badan jalan, dan *Knowledge* yang akan didapatkan oleh Pemerintah adalah pemasukan yang didapatkan dari retribusi parkir. Melalui data tersebut, potensi KMS diharapkan mampu memberikan pengelolaan yang optimal dan berguna dalam pengelolaan area parkir dan retribusi parkir di Kota Bandung.

Dalam perancangan KMS tersebut menggunakan *framework* CodeIgniter. Penggunaan *framework* CodeIgniter akan memberikan kenyamanan bagi *user* dalam menggunakannya, karena sifatnya yang ringan, cepat, *user friendly* dan memiliki sistem keamanan (*security*) yang handal. KMS tersebut juga akan didukung arsitektur terdistribusi sehingga dapat memberikan kemudahan akses bagi pengguna KMS dalam peningkatan optimasi dan efisiensi pengelolaan area parkir dan pengelolaan retribusi dari parkir di Kota Bandung. Untuk itu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam Perancangan *Knowledge Management System* (KMS) Pengelolaan Retribusi Area Parkir Kota Bandung berbasis *knowledge conversion* 5C dan 4C dengan metode *iterative* dan *incremental*.

I. 2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana rancangan sebuah *Knowledge Management System* (KMS) untuk pengelolaan area parkir di Kota Bandung menggunakan *framework* CodeIgniter dengan metode *iterative* dan *incremental*?
2. Bagaimana *Knowledge Management System* (KMS) untuk fitur *knowledge* retribusi area parkir di Kota Bandung?

I. 3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang telah terdefiniskan di atas maka tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah:

1. Melakukan perancangan *Knowledge Management System* (KMS) untuk pengelolaan retribusi area parkir di Kota Bandung menggunakan *framework* CodeIgniter dengan metode *iterative* dan *incremental*.
2. Melakukan perancangan *Knowledge Management System* (KMS) untuk mendapatkan *knowledge* retribusi area parkir di Kota Bandung

I. 4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1. Memberikan informasi mengenai kondisi suatu area parkir dan pendapatan suatu area parkir di Kota Bandung sehingga memudahkan Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan area parkir tersebut.

2. Memberikan *knowledge* bagi pemilik area parkir sehingga mampu membuat kebijakan dalam hal pengelolaan area parkir di tempatnya;
3. Mengurangi jumlah parkir liar yang ada di Kota Bandung sehingga mampu meminimalkan angka kemacetan dan meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.

I. 5 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian hanya mencakup area parkir tepi jalan umum Kota Bandung di wilayah Cibeunying khususnya Jl.RE Martadinata.
2. Aplikasi *Knowledge Management System* (KMS) ini menggunakan teknologi PHP berbasis *framework* CodeIgniter.
3. Perancangan aplikasi ini berakhir pada tahap pengujian, tidak sampai pada tahap implementasi langsung ke Pemerintah Kota Bandung.